



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **OLVIE ATTENG, SE, M.Si**
J a b a t a n : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : **OLLY DONDOKAMBAY, SE**
J a b a t a n : Gubernur Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua, Manado, Oktober 2018
PihakPertama,

OLLY DONDOKAMBAY, SE

OLVIE ATTENG, SE, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Antar Tahun Anggaran	Minimal 5%
		Proposi PAD terhadap Daerah	31%
2	Terdatanya Potensi Pajak Daerah dan Bukan Pajak Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak:	
		1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Air Permukaan 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Jumlah Wajib Retribusi 5. Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	691.120 KBM 18 WP 7 WAPU 31 WR 15 Objek
3	Efektifnya Pemungutan Seluruh Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Potensi Wajib Pajak yang Terpunggut	63%
		2. Persentase Potensi Wajib Retribusi yang terpunggut	100%
		3. Persentase Potensi Objek Penerimaan di Luar Pajak Daerah dan Retribusi dan Retribusi Daerah yang Terpunggut / yang diterima	100%
4	Meningkatnya Kualitas Aparatur	1. Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Fungsional	2%
		2. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan substantif	2,5%
5	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengelola Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	80%
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik yang Menopang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Rasio Cakupan Centra Layanan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Perhari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:60
		2. Persentase Ketersediaan	100%

		3. Standar Operasional Prosedur terhadap Kebutuhan 4. Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan Terhadap Kebutuhan	100%
7	Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Gangguan dan Sistem 2. Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,8% 1,8%
8	Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah	Prosentasi Perangkat Daerah Penghasil Kab/ Kota/ Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan.	100%
9	Meningkatnya Ketepatan dan Keakuratan Penyusunan Pelaporan Kinerja	1. Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 2. Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu Dengan Tepat Data: 3. Jumlah Temuan SPI 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Pengawasan	100% 100% 7 Temuan 100%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal dalam rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah	Rp.6.475.594.324
2.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya Kajian Potensi dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 121.250.700
3.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Sistem Samsat Online	Rp. 2.468.490.100
4.	Program Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Pendapatan Daerah	Rp. 83.391.800
5.	Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil	Pengawasan Terwujudnya Tertib administrasi Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Aset dan Personil	Rp. 375.795.000
6.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Rp. 302.600.000
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Administrasi, Pelayanan	Rp. 13.811.616.676

		Publik dan Aparatur	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur	Rp. 7.749.235.211
9.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Rp. 623.395.905
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDA	Rp. 373.906.505
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 554.267.300
12.	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Pameran dan Promosi	Rp. 125.500.000
13.	Program Perencanaan SKPD	Terwujudnya Penyusunan Rencana Strategi SKPD	Rp. 88.841.000

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 84.598.294.321

APBD (PAD) : Rp. 84.598.294.321

- Belanja Langsung : Rp. 33.738.517.321

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 50.859.777.000

Manado, Oktober 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

OLVIE ATTENG, SE, M.Si